

A GENDER-BASED ANALYSIS OF KURIKULUM MERDEKA (An Epistemological Review)

Siti Nur Maela¹, Abdul Wachid Bambang Suharto²,

¹ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; sitinurmaela26@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ; abdulwachidbs@uinsaizu.ac.id

* Corresponding author: **Siti Nur Maela**

Article History

Received: 2026-01-10

Revised: 2026-05-24

Accepted: 2026-06-10

Published: 2026-06-30

Keywords: Independent

Curriculum, Gender Perspective,

Gender-Based Curriculum,

Epistemology

Citation: Maela, S. N., & Suharto, A. W. B. (2026). A gender-based analysis of Kurikulum Merdeka (An epistemological review). *Indonesian Journal of Usuluddin and Islamic Governance Studies*, 7(1), 43-97. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v7i01.7644>



Copyright: © 2026 The Author(s). This article is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Abstract: This research was born from the author's concerns about various cases of sexual violence and bullying in the world of education. For example, there were reports of 202 students being victims of sexual violence in the school environment. With the emergence of cases like this, it is necessary to make efforts to analyze this, one of which is through implementing a gender-based curriculum, so the idea of a gender perspective independent curriculum analysis study in epistemological review emerges. This research aims to 1) analyze how essential it is to implement gender-based values in the independent curriculum in schools and 2) how the review of epistemological philosophy responds to the independent curriculum with a gender perspective. This journal study uses library research by collecting various data sourced from books, journals, articles and certain writings, one of which is data sources related to the curriculum in Indonesia or references with similar discussions to obtain valid and actual data. After carrying out the analysis, it was found that the independent curriculum really includes the values of gender equality, including the independent curriculum with a differentiated approach, the P5 project, the Strengthening Pancasila Student Profile Project and the national assessment of education reports on the Gender Equality Climate assessment. From an epistemological perspective, a gender perspective-free curriculum already represents a spirit that is in line with the constructivist learning paradigm. From the results of this research, it is hoped that a curriculum with a gender perspective can be implemented on a massive scale to create a more gender-equitable educational environment.

DOI: 10.21154/ijougs.v7i01.7644

PENDAHULUAN

Di tengah terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan adanya kurikulum merdeka, ternyata di sekolah-sekolah masih cukup banyak terjadi praktik kekerasan baik yang dilakukan oleh pendidik ataupun peserta didik sendiri. Padahal dalam kurikulum merdeka hal yang menjadi fokus utama adalah penguatan karakter namun dalam lapangan masih terjadi penyimpangan. Dilansir dari mediaindonesia.com bahwasanya ada 202 anak dilaporkan sebagai korban dari kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah, yang mana data tersebut diambil dari Januari sampai Mei 2023 yang dihimpun datanya oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Berdasarkan laporan dari FSGI memaparkan bahwasanya dalam kasus kekerasan yang terjadi, hampir sebagian besar elemen pendidikan pernah terlibat kasus, mulai dari guru, kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren hingga kasus yang menggeret guru ngaji juga pernah terjadi. Dimana kasus terbanyak yaitu 31,80% oleh guru.

Selain kasus tersebut baru-baru ini juga ramai di media sosial tentang kasus perundungan yang dilakukan oleh peserta didik kepada kawannya sendiri yang terjadi di salah satu sekolah di Cilacap. Melihat sepiintas kasus-kasus tersebut menjadi sebuah keprihatinan dimana pendidikan selayaknya sebagai pembentukan karakter akan tetapi malah sebaliknya, sehingga cita-cita luhur pendidikan yang termaktub dalam "UU No. 20 Tahun 2003" untuk mencetak peserta didik yang mumpuni dalam spiritual, memiliki kepribadian, cakap dalam kontrol diri, memiliki intelegualitas, akhlak mulia, serta *skill* yang mumpuni nyatanya tidak sesuai realitas.

Menanggapi berbagai kasus dan juga *flashback* dari tujuan pendidikan, maka perlu adanya langkah-langkah dalam memperbaiki dunia pendidikan salah satunya dengan penerapan kurikulum yang peka terhadap permasalahan, salah satunya kurikulum berbasis gender, dengan menerapkan kurikulum yang lebih responsif kesetaraan gender besar kemungkinan peserta didik akan beradaptasi dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang tidak diskriminatif meski adanya perbedaan jenis kelamin¹ ditambah lagi kurikulum merdeka sejatinya mengajarkan merdeka belajar, yang mana konsep ini merupakan bagian dari garis haluan terbaru yang dicanangkan oleh lingkup

¹ Anik Gufron. "Implementasi Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender". Makalah Seminar Nasional "Gender dalam Pendidikan Formal", Hima Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ² selain itu mengulas tentang pengetahuan gender dalam perspektif secara ontologis telah berkembang cukup pesat, mulai dari sisi sosial humaniora (antropologi, sosiologi, sastra, komunikasi, psikologi) hingga dalam bidang hukum dan ekonomi. Sehingga kajian tentang gender ini bukan menjadi hal tabu jika dibahas dalam ranah kurikulum pendidikan³.

Usaha-usaha untuk konstruksi pengimplementasian kurikulum yang berperspektif gender pada ranah pendidikan sudah cukup banyak dilakukan antara lain, dalam lingkup Perguruan Tinggi Agama Islam sudah ada lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), seperti dilansir dari website umsida.ac.id/ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) memiliki lembaga yang fokus pada isu perempuan dan anak, mengadakan kegiatan Pelatihan Sekolah Dasar Responsif Gender, untuk mengedukasi para pemegang kebijakan sekolah dasar yang ada di Sidoarjo terkait menerapkan kurikulum yang responsif gender. Selain itu ada juga "Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)" dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama RI, melakukan penguatan konstruksi isu gender dalam lembaga pendidikan, salah satunya membuat Kegiatan seperti Training untuk pelatih dari Fasilitator Nasional (Fasnas) untuk melakukan program GEDSI atau dikenal dengan madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan yang adil Gender, Disabilitas serta Inklusi Sosial.

Sebagai penguat dari kajian yang penulis buat ini, berdasarkan dari penelitian terkait serta penelitian terdahulu menunjukkan bahwa :

1. Hasil penelitian dalam satuan pendidikan usia dini, ditemukan bahwa secara tidak langsung penerapan kurikulum yang inklusif gender sudah berjalan baik, akan tetapi dalam hal pembuatan dan penyusunan kurikulum yang berperspektif keadilan gender masih dalam kategori tidak baik. Sehingga dapat disimpulkan dalam tataran praktek sudah dilakukan namun dalam tataran tekstual belum dilakukan⁴.
2. Berdasarkan penelitian dari "Analytical And Capacity Development

² Edy Dharma, dkk. "MERDEKA BELAJAR: KAJIAN LITERATUR". Prosiding Konferensi Nasional Pendidikan. Merdeka Belajar di Era Pendidikan 4.0. No. 186, 2020

³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan, Tinjauan dalam Berbagai*

Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 25

⁴ Adolf Bastian dan Yesi Novitasari, "Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Gender" dalam *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4359-4366, 2022.

Partnership” (ACDP) memaparkan bahwa penerapan praktik pengarusutamaan gender (PUG) dalam dunia pendidikan baik itu secara nasional atau internasional sudah dilakukan secara masif, namun di Indonesia sendiri langkah PUG dalam dunia pendidikan masih bersifat lokal dan hanya sebatas program *pilot project* skala kecil yang kemudian tidak di follow up untuk dikembangkan secara meluas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran gender ini masih rendah dalam lingkup sosial khususnya pendidikan.⁵

3. Penelitian tentang gender perspektif filsafat ilmu nyatanya telah dilengkapi dari hasil kolaborasi berupa sudut pandang ontologis, epistemologis serta aksiologis.⁶
4. Merdeka Belajar yang merupakan program pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional agar mampu bersaing dengan dunia dapat diteliti dalam filsafat esensialisme dengan berbagai sudut pandang diantaranya mengenai fungsi sekolah, pandangan terhadap tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, serta peran guru.⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip tentang hasil penelitiannya, maka menurut hemat penulis masing-masing penelitian memiliki tema yang menarik akan tetapi belum menyentuh hakikat dari kegunaannya secara mendalam dalam bidang filsafat, ada hasil penelitian yang melakukan pendekatan secara mendalam melalui perspektif filsafat akan tetapi belum menyentuh ranah kepekaan sosial khususnya yang inklusif gender. Maka dari studi terdahulu yang akan direspon dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan kurikulum merdeka dalam perspektif gender dan untuk penguatannya akan dianalisis dalam tinjauan filsafat epistemologi.

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk melengkapi penelitian dan kajian terdahulu dengan cara menganalisis kurikulum merdeka dalam penerapannya apakah sudah melakukan pendekatan perspektif gender secara holistik, mengingat masih cukup banyak ditemui beberapa kasus dalam dunia

⁵ ACDP KemendikbudRistek, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Indonesia” dalam Respository, Kemdikbud.go.id. Retrieved September 28, from <https://repositori.kemdikbud.go.id/8569/1/Policy-Brief-ACDP-Gender-Equality-Indonesia-FINAL.pdf>, 2022

⁶ *Ibid.*, hlm. 26

⁷ Nurur Rubungah dkk, “Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Filsafat Esensialisme Endang Fauziati. Dalam Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) (Vol. 1, Nomor 1), 2023

pendidikan, maka dari itu untuk lebih menguatkan kajian tersebut akan dibahas secara mendalam dari sudut pandang filsafat epistemologi. Sejalan dengan hal tersebut penulis merangkum berbagai pertanyaan menjadi dua poin dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah esensial penerapan nilai-nilai berbasis gender dalam kurikulum merdeka di sekolah? 2) Bagaimana pandangan filsafat epistemologi merespon dari kurikulum merdeka yang berperspektif gender?

Studi tentang kurikulum merdeka perspektif gender dalam tinjauan epistemologi ini dilakukan berdasarkan pada beberapa argumen: 1) Adanya berbagai macam regulasi tentang penguatan kesadaran gender yang sudah ada seperti, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Kemendikbud Ristek No. 84 th 2008; Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020 2024 (PUG); dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2006. 2) Masih cukup banyak ditemui berbagai kasus kekerasan baik yang bersifat kekerasan seksual atau perundungan yang dilakukan dalam lingkup dunia pendidikan. 3) Telah banyak program atau praktik tentang inovasi pengarusutamaan gender dalam dunia pendidik namun sering kali masih sebatas uji coba dan tidak dikembangkan. 4) Kurikulum Merdeka yang sudah dikaji melalui beberapa pendekatan, namun belum banyak kajian pendekatan tentang perspektif gender, maka untuk menguji keabsahannya akan dianalisis dalam pandangan filsafat epistemologi untuk menjawab bahwa kajian tentang gender dalam kurikulum ini menjadi sangat penting.

METODE

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif yang berakar pada **Paradigma Kritis** guna mendekonstruksi teks kebijakan, struktur pengetahuan, serta implementasi operasional Kurikulum Merdeka melalui kaca mata keadilan gender dan filsafat epistemologi. Pendekatan kritis dipilih secara sengaja untuk melampaui analisis birokratik-normatif; alih-alih sekadar mendeskripsikan regulasi kurikulum secara tekstual, paradigma ini berfungsi membongkar bagaimana bias gender, pelabelan peran domestik, dan relasi kuasa patriarki beroperasi di dalam ruang institusi pendidikan. Desain ini menjadi fondasi metodologis yang kokoh untuk menguji keabsahan pengarusutamaan gender (PUG) di dalam kebijakan makro pendidikan Indonesia dengan menempatkan kurikulum bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai instrumen politis-ideologis yang membentuk kesadaran kemanusiaan yang emansipatif.

Sebagai studi filsafat dan kebijakan pendidikan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah **Studi Kepustakaan (Library Research) Berbasis Digital** yang dilakukan secara terstruktur dan terukur. Korpus data dalam penelitian ini tidak dikumpulkan secara acak, melainkan diseleksi secara ketat melalui kriteria inklusi substantif yang dibagi menjadi data primer dan sekunder: pertama, dokumen kebijakan resmi Kurikulum Merdeka dari Kemendikbudristek yang mencakup Panduan Dimensi Profil Pelajar Pancasila (P5), regulasi Pembelajaran Berdiferensiasi, serta instrumen indikator Iklim Kesetaraan Gender dalam Rapor Pendidikan; kedua, data empiris sekunder mengenai eskalasi kasus kekerasan seksual dan perundungan berbasis gender di sekolah dari lembaga tepercaya (seperti FSGI dan Komnas Perempuan), serta naskah teoretis filsafat ilmu khususnya epistemologi konstruktivisme dan teori gender kritis. Seluruh materi teks ini didigitalisasi dan dikonversi menjadi unit-unit naratif substantif yang siap dianalisis.

Analisis data dilakukan menggunakan metode **Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis)** yang disintesis dengan kerangka epistemologi konstruktivis dan konsep nalar kritis kesadaran hakiki. Langkah analisis tidak memperlakukan teks kebijakan secara harfiah, melainkan melalui tiga tahapan kodifikasi kritis yang ketat: *Pertama*, tahap dekonstruksi tekstual (*textual deconstruction*) untuk melacak keberadaan bias gender, stereotipe, maupun subordinasi yang tersembunyi dalam bahan ajar; *Kedua*, tahap pemetaan epistemologis (*epistemological mapping*) untuk menilai apakah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek P5 telah memenuhi syarat sebagai pengetahuan yang absah dalam mentransmisikan nilai kesetaraan; *Ketiga*, tahap rekonstruksi transformatif (*transformative reconstruction*) untuk menguji apakah instrumen penilaian Iklim Kesetaraan Gender sekolah mampu menembus batasan formalitas menuju aksi emansipatif nyata di lingkungan madrasah dan sekolah umum.

Untuk menjaga rigoritas, validitas, dan objektivitas ilmiah dalam studi kepustakaan ini, peneliti menerapkan skema **Triangulasi Sumber Data dan Hermeneutika Kritis**. Validitas data diuji dengan menyilangkan regulasi tekstual formal dari kementerian dengan data empiris di lapangan terkait realitas kasus kekerasan dan praktik PUG berskala lokal yang cenderung berhenti pada tahap proyek percontohan (*pilot project*). Selain itu, kedalaman analitis (*analytical depth*) dipertahankan dengan menguji konsistensi internal antara klaim-klaim Kurikulum Merdeka mengenai hak asasi dan kemerdekaan belajar dengan

perspektif keadilan sosial yang menjadi inti dari filsafat ilmu. Peneliti secara ketat menghindari klaim subjektif dengan menyandarkan setiap interpretasi teks pada referensi teoretis gender dan epistemologi Islam/Barat yang mapan.

Prinsip etika akademis dan **Refleksivitas Metodologis** dipatuhi sepenuhnya sepanjang proses penelitian ini dilakukan. Mengingat isu kekerasan seksual dan perundungan dalam dunia pendidikan melibatkan subjek anak dan kelompok rentan, penelitian ini berkomitmen penuh pada pembatasan penggunaan data sekunder yang bersifat anonim dan tidak membuka identitas korban atau lembaga spesifik demi kehormatan subjek. Secara refleksif, peneliti memosisikan diri bukan sebagai komentator kebijakan yang berjarak, melainkan sebagai akademisi kritis yang mengemban tanggung jawab epistemik untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan nasional yang aman, inklusif, dan adil gender. Posisi etis-politis inilah yang memastikan bahwa luaran dari analisis kepustakaan ini mampu menawarkan kontribusi teoretis yang terukur bagi pengembangan model kurikulum yang transformatif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurikulum Berbasis Gender

a. Pengertian Gender

Masih cukup banyak orang yang salah mengartikan antara gender dan sex, padahal dua istilah tersebut memiliki arti yang jauh, seperti yang penjelasan dari Valerie Oosterveld. Menurut Valerie, "sex is a biological determination. Gender is not fixed or innate but has cultural and social meaning over time". Sedangkan, menurut Musdah Mulia dalam Febriani berpendapat bahwa, gender merupakan sebuah sikap, perilaku dan tanggung jawab, akan fungsi, hak serta peran yang menempel pada individu baik laki-laki atau perempuan, yang diperoleh dari konstruksi budaya atau pandangan masyarakat luas, dalam lingkup dimana mereka lahir dan dibesarkan. Hal tersebut mengartikan bahwa gender adalah sebuah pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh masyarakat karena faktor sosial budaya, hal tersebut

bersifat dinamis dapat dipertukarkan atau berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada.⁸

Jika dilihat dari sisi praktis perbedaan ini sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun sering kali adanya perbedaan gender ini muncul berbagai ketimpangan dan ketidakadilan, oleh karena itu dan pengetahuan adil gender ini perlu untuk disebarluaskan bahkan masuk dalam kurikulum tiap satuan pendidikan.

Islam senantiasa menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam hal intelektualitas, kemampuan nalar, kesempatan belajar dan beribadah kepada Tuhan⁹. Beberapa nash dalam Al-Quran tentang kedudukan perempuan bisa kita temui pada beberapa ayat, seperti QS. al-Dzariyat :56 yang berisikan perempuan maupun laki-laki sama-sama menjadi hamba untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT; perempuan dan laki-laki saling berpartner (QS. al Naba' : 8); baik perempuan atau laki-laki bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal amal perbuatan yang dilakukan (QS. Maryam : 93-95)¹⁰.

Menurut Nur Rofiah dalam bukunya yang berjudul *Nalar Kritis Muslimah* menjelaskan, cara pandang terhadap lima pengalaman biologis dan lima pengalaman sosial perempuan menentukan tingkat kesadaran kemanusiaan terhadap perempuan, yang kemudian sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesejahteraan manusia sebagai tujuan ajaran agama. yang mana tingkatan tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, tingkat dekriminasi dan superioritas laki-laki masih tinggi terhadap perempuan. Kedua, tingkat kesadaran formal dengan menempatkan perempuan sejajar akan tetapi belum memahami kebutuhan khusus mereka. Ketiga, kesadaran hakiki yaitu dalam memandang kesetaraan gender adalah sesuatu yang mesti dilakukan bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.¹¹

⁸ Nur Arfiyah Febriani, "EKOSUFISME BERWAWASAN GENDER DALAM AL-QUR'AN". Dalam *Ekosufisme Berwawasan Gender dalam Al-Qur'an Musāwa* (Vol. 16, Nomor 1), 2017

⁹ Umi Hanik dan Mohammad Fauzi, "Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus Di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)". Dalam *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 2, pp. 50~58, ISSN: 2963-4075. 1(2), 50-58, 2023.

¹⁰ Qurrotul Ainiyah, "PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM". dalam *Pendahuluan* no. 4-5, 2008.

¹¹ Nur Rofiah, Bil.Uzm. *Nalar Kritis Muslimah* (Yogyakarta : Afkaruna , 2020), hlm. 17

b. Kurikulum Berbasis Gender

Pendidikan sebagai lingkungan yang mencerahkan nyatanya masih sering muncul sebuah pelabelan, seperti pendapat Suhapti orang-orang disekitar kita masih beranggapan jika anak perempuan dan laki-laki memiliki kecenderungan dalam pendidikan yang dipilih.¹² Sebagai contoh anak perempuan dilabelkan lebih cocok memilih jurusan bahasa dan pendidikan, sedangkan laki-laki lebih sesuai untuk memilih jurusan teknik. Sehingga perempuan dianggap lemah dalam bidang matematika serta laki-laki lemah dalam bidang bahasa, dari pelabelan tersebut akan mengakibatkan pembatasan berfikir serta mengotak-ngotakan kemampuan. Maka dari itu persoalan tentang gender dalam pendidikan ini perlu menjadi perhatian khusus, mulai dari pendidikan dini hingga pendidikan tinggi.

Pendapat lain dari (Ampera, 2012) menyebutkan bahwa konten-konten yang ditemui pada buku kurikulum pembelajaran (agama atau umum) realitasnya masih terdapat pesan pelajaran yang menunjukkan laki-laki lebih berperan pada sektor publik dan sebaliknya perempuan diarahkan untuk pada sektor domestik. Kesimpulannya kurikulum yang berisikan materi dan bahan ajar untuk peserta didik belum menunjukkan nilai keadilan gender yang terdapat pada gambar atau narasi kalimat yang digunakan dalam penyampaian materi.

Kurikulum sekolah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan berkesempatan sama untuk sukses dan mengenyam pendidikan yang tingkatkan lebih tinggi. Kurikulum berperspektif gender tergambar pada pemberian kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses belajar dan mengajarnya. Sehingga peserta didik diberikan perlakuan, hak dan kewajiban, sikap tanggung jawab, serta nilai yang adil dalam proses berlangsungnya pembelajaran.

Beberapa ciri dari kurikulum berbasis keadilan gender adalah sebagai berikut: 1) Peserta didik baik laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan pengalaman belajar dan kesempatan yang sama seperti yang tertulis dalam kurikulum yang berlaku; 2) Materi dan konten pembelajarannya disusun dari berbagai referensi yang tidak bias gender; dan

¹² Retno Suhapti "Gender Dan Permasalahannya". Dalam Buletin Psikologi, Vol. 3(1), 44-50, ISSN : 0854-7106, 1995.

3) Mendorong siswa aktif berpartisipasi dalam proses transformasi serta transmisi pengalaman belajar mengajar antar semua siswa¹³.

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum adalah rencana keseluruhan yang dirancang oleh lembaga pendidikan atau sistem pendidikan untuk memberikan arah kepada proses pembelajaran. Dalam pengertian lain kurikulum diartikan sebagai sebuah rancangan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditujukan dapat menumbuhkan kompetensi personal dan sosial siswa, melalui rangkaian pengetahuan dan pengalaman yang terstruktur dibawah tanggung jawab dan bantuan sekolah.¹⁴ Gagasan kurikulum merdeka belajar mulai muncul pada tahun 2019 dan diluncurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, munculnya kurikulum tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum pendidikan yang dilaksanakan telah terlebih dulu melalui proses penyesuaian serta adaptasi dalam merdeka belajar¹⁵.

Kurikulum merdeka awalnya merupakan program pembelajaran alternatif yang muncul sebagai solusi atas tantangan di masa pandemi, kebijakan tersebut memunculkan sebuah jargon 'merdeka belajar' sehingga pihak sekolah diberi kesempatan untuk mengelola jalannya pembelajaran dan program yang dikembangkan dalam kurikulum, disesuaikan dengan minat serta kebutuhan peserta didik¹⁶. Menjalankan esensi dari kurikulum merdeka yang paling utama adalah memahami akan visi dan misi belajar. Merdeka belajar memiliki sebuah visi yakni pendidikan yang ada diharapkan dapat merealisasikan sebuah kemajuan bangsa, salah satu langkahnya yaitu dengan membentuk Pelajar Pancasila, agar mereka memiliki sifat dan sikap yang mencerminkan kemandirian, kedaulatan serta kepribadian yang baik. Setidaknya ada 6 ciri dari profil pelajar pancasila yang terdapat pada Kurikulum Merdeka, (1) Membangun spiritual dengan dengan mengajarkan

¹³ Anik Gufron. "Implementasi Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender". Makalah Seminar Nasional "Gender dalam Pendidikan Formal", Hima Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009.

¹⁴ Sudarman. "Buku Ajar Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik"(Samarinda : Mulawarman University Press, 2019) hlm. 5.

¹⁵ Eni Andari, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning Management System (LMS)". Dalam Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru, 1(2), 65-79. <https://doi.org/10.30762/allimna.v1i2.694>, 2022.

¹⁶ Johar Alimudin, "IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DASAR IMPLEMENTATION OF KURIKULUM MERDEKA IN ELEMENTARY SCHOOL" dalam Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL, 4(02), 67-75.

konsep iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia (2) Sikap mandiri (3) Membangun nalar kritis (4) wawasan global (5) Gotong-royong dan (6) Kreatifitas.¹⁷

Kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang berlaku sekarang, memiliki salah satu pendekatan yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini memberikan kebebasan dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga dapat mengembangkan potensinya berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Di sini guru dituntut kreatif untuk mencari cara, metode dan strategi mempelajari materi pembelajaran menurut metode pengajaran yang berdiferensiasi atau berbeda-beda. Guru juga diberi kebebasan menyeting bahan serta materi pelajaran, proses belajar dan assesment yang diberikan kepada siswa.¹⁸

Sugianto pada papernya yang diakses melalui laman website bgpsumsel.kemdikbud.go.id menjelaskan bahwa secara konseptual, metode pengajaran berdiferensiasi menjadikan guru atau pendidikan memposisikan diri untuk memiliki pemahaman yang setingkat dengan peserta didik, dari hal tersebut guru akan memperoleh preferensi untuk kegiatan belajar mengajar yang efektif bagi siswanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran model ini memiliki tujuan untuk membangun kesetaraan belajar serta meminimalisir kesenjangan antar siswa baik yang berhasil atau tidak berhasil. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang membuat siswa menjadi tertantang.¹⁹

3. Analisis Kurikulum Merdeka Perspektif Gender

Kajian gender menyebutkan bahwasannya pandangan gender berkaitan dengan anggapan, peran, sikap, hak serta tanggung jawab sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Sedangkan di kalangan masyarakat masih sering muncul praktik ketidakadilan gender, meminjam istilah dari Mansur Fakih yang memiliki julukan Bapak Feminis Indonesia, menyebutkan definisi gender dianggap bagaikan sifat yang menempel pada kaum laki-laki maupun

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁸ Riza Maulida, "Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka" <https://sdnkembangarum01.dikdas.semarangkota.go.id/read/artikel-populer-pembelajaran-berdiferensiasi-pada-kurikulum-merdeka> 25 September 2023

¹⁹ Sugianto, "Pembelajaran Berdiferensiasi Antara Manfaat Dan Tantangannya" <https://bgpsumsel.kemdikbud.go.id/pembelajaran-berdiferensiasi-antara-manfaat-dan-tantangannya/>, 2022. diakses pada 26 September 2023

perempuan dan dikonstruksikan dari segi kepercayaan sosial dan kultural.²⁰ Ketidakadilan gender dalam masyarakat masih sering ditemui antara lain : Stereotipe, diskriminasi, subordinasi, *double burden* dan kekerasan, hal tersebut masih terus terjadi dikarenakan masih melekatnya budaya patriarki, sehingga sering kali menempatkan perempuan sebagai *konco wingking* yang lebih memiliki peran besar dalam sisi domestik berupa dapur, sumur dan kasur.

Maka dari itu untuk merubah kearah yang lebih baik dan merekonstruksi dari ketidakadilan gender menuju kesetaraan gender salah satunya melalui dunia pendidikan, dalam hal ini membangun kesadaran kesetaraan gender dalam implementasi kurikulum merdeka yang berperspektif gender. Setelah penulis mencoba mengumpulkan beberapa referensi penelitian dan kajian dari jurnal, buku maupun sumber media yang lain, ternyata terdapat beberapa penemuan tentang kurikulum merdeka yang sudah mengover pengetahuan dan penerapan kesetaraan gender, berikut beberapa poin kurikulum merdeka yang menggambarkan perspektif gender :

1) Kurikulum Merdeka dengan Pendekatan Berdiferensiasi

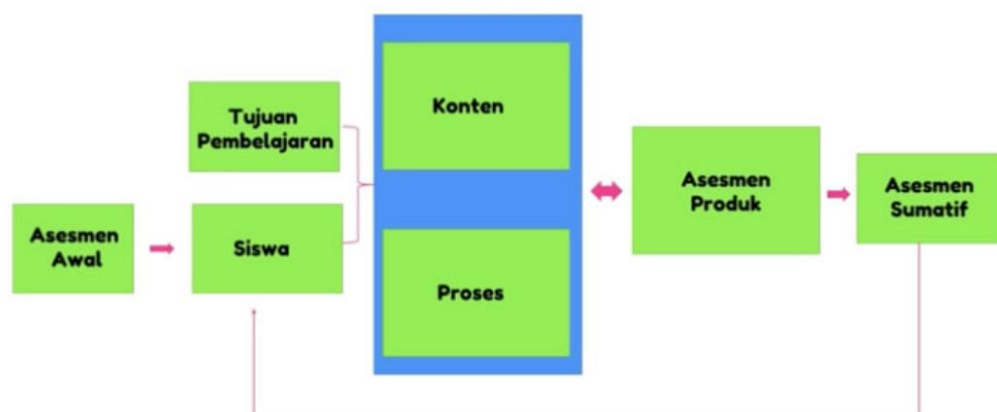
Kajian gender senantiasa menempatkan laki-laki atau perempuan senantiasa memiliki kesamaan hak, yang membedakan hanyalah faktor-faktor biologis yang bersifat kondrati dan tingkat ketaqwaan dalam pandangan agama islam. Nilai tersebut dalam tataran kurikulum sudah terwakili melalui model pembelajaran melalui pendekatan berdiferensiasi, pembelajaran ini menjelaskan sebuah instruksi pembelajaran yang menggunakan metode pengajaran tertentu guna terpenuhinya kebutuhan siswa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam implementasinya pendidik memberikan sebuah pengetahuan serta pemahaman dari mapel dan model pengajaran yang disesuaikan kebutuhan siswa.

Kata kunci dari model pendekatan berdiferensiasi adalah membangun kesetaraan belajar bagi semua siswa guna menjembatani perbedaan belajar untuk siswa laki-laki maupun perempuan, baik yang

²⁰ Mansour Fakhri, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 6.

berprestasi atau tidak. Hal tersebut sudah menjembatani konsep keadilan gender yakni memiliki kesetaraan dalam peran, perilaku serta hak nya dalam memperoleh pembelajaran.

Sebagai penguat lainnya menurut Neti yang dikutip melalui umsida.ac.id salah satu pembelajaran responsif gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mulai membuat program pelatihan sekolah responsif gender. Program ini sangat relevan dengan implementasi kurikulum merdeka, dan pendekatan yang bisa dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menerangkan dalam pendekatan berdiferensiasi senantiasa melaksanakan beberapa faktor yaitu kesiapan kegiatan belajar mengajar, faktor sosial budaya, profil dan minat siswa. Berikut ini adalah proses pembelajaran yang berbeda :



Gambar 1. Langkah pembelajaran berdiferensiasi

Untuk menyisipkan nilai keadilan gender dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut, pendidik nantinya bisa mencoba mengumpulkan data pada proses asesmen awal, sembari menguji tingkat pemahaman pada mata pelajaran juga tingkat pemahaman akan nilai kesetaraan gender dalam lingkup kelas atau sekolah. Selanjutnya dalam penerapan proses pendekatan berdiferensiasi, karena bertujuan untuk mengembangkan potensi murid tanpa memandang gender, maka langkah kecil yang bisa dilakukan adalah penugasan kelompok yang anggotanya berisikan siswa laki-laki dan perempuan. Hal tersebut untuk menanamkan pemahaman bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menjadi masalah, masing-masing mempunyai tanggung jawab serta peran yang setara dalam suatu kelompok.

2) Program P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Berdasarkan panduan dari dimensi, elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila yang dikeluarkan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dari Kemendikbud Ristek (2022:11). Proyek P5 ini merupakan bentuk pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Profil Pelajar Pancasila menjadi pedoman khusus untuk rujukan guru dalam mengembangkan karakter dan keterampilan siswa. Seluruh pemangku kepentingan akan memahami profil pelajar Pancasila karena peran pentingnya. Profil ini harus disederhanakan agar mudah diingat serta dikelola baik oleh guru maupun siswa sehingga dapat dijalani dalam aktivitas keseharian.²¹

Kaitannya dengan nilai perspektif gender dalam proyek P5 ini, nilai tersebut terdapat dalam dimensi ke empat “Kebinekaan Global Pelajar Indonesia memgang teguh budaya leluhur, mempertahankan identitas lokal, serta tetap terbuka dengan budaya lain” dari dimensi tersebut akan menumbuhkan rasa hormat dan kemungkinan tercipta sebuah budaya baru yang baik dan tanpa meninggalkan budaya lokal bangsa. Hal tersebut memperkuat poin yang menggambarkan nilai perspektif kesetaraan gender dan keadilan yang terdapat pada dua poin yaitu :

a. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan

Pelajar Pancasila secara diajarkan untuk menumbuhkan kesadaran serta pengalaman yang beragam agar bisa terhindar dari pandangan stereotip akan munculnya budaya yang beragam, termasuk didalamnya ketidakadilan, kekerasan, dan intoleransi. Dengan memperoleh pengetahuan tersebut maka akan membuat pelajar pancasila lebih kompatibel terhadap perbedaan budaya sehingga akan terwujud kehidupan yang harmonis dan setara diantara sesama manusia.

b. Berkeadilan Sosial

Pelajar Pancasila senantiasa merasa peduli serta berpartisipasi aktif untuk mewujudkan keadilan sosial di lingkup sampai internasional. Pelajar Pancasila meyakini kekuasaan dan kewenangannya dalam modal untuk memperkuat demokrasi untuk

²¹ Kemendikbud Kemendikbud.” Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka “. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek.2022.

berperan aktif dalam pembangunan perdamaian masyarakat inklusif dan tidak eksklusif, serta bertujuan berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Dari penjelasan dua poin diatas, maka dapat diberi kesimpulan nilai pada kurikulum merdeka sudah mewakili dari nilai-nilai tentang kesetaraan gender, khususnya pada poin untuk menghindari dari perilaku stereotip, perundungan, intoleransi dan juga kekerasan. Poin-poin tersebut menjadi nilai yang terkandung dalam perpespektif keadilan gender begitupun pada poin keadilan sosial.

Dalam praktiknya penerapan nilai-nilai perspektif gender sudah masuk dengan kurikulum merdeka. Khususnya pada program P5 ini, dimana didalamnya sudah benar-benar tertanam nilai kesetaraan gender. Contoh riilnya yaitu Proyek kearifan lokal mengolah makanan, dalam praktiknya siswa laki-laki dan perempuan saling bekerjasama untuk memasak dimana pekerjaan memasak sering kali di kontruksikan sebagai kegiatan kaum perempuan. Dengan adanya praktik tersebut siswa diberikan pemahaman bahwa dalam realitasnya tugas domestik salah satunya memasak menjadi tanggung jawab dan tugas bersama baik laki-laki maupun perempuan.

3) Asesmen Nasional pada Kurikulum Merdeka untuk Satuan Pendidikan

Hasil pengumpulan dokumentasi yang diperoleh, menunjukkan bahwasannya penerapan Pendidikan yang perspektif gender secara eksplisit dalam bentuk konten belum memang terealisasi, akan tetapi pembentukan karakter siswa untuk memiliki kesadaran gender sudah dilakukan. Sebagai contoh implementasi dalam pembelajaran tidak lagi membedakan gender dalam pembuatan kelompok belajar. Lebih jauh lagi dalam panduan Asesmen Nasional kurikulum merdeka ternyata didalamnya sudah tertera dengan jelas poin asesmen Iklim Kesetaraan Gender dan juga Kesenjangan Iklim Kesetaraan Gender. Dua poin

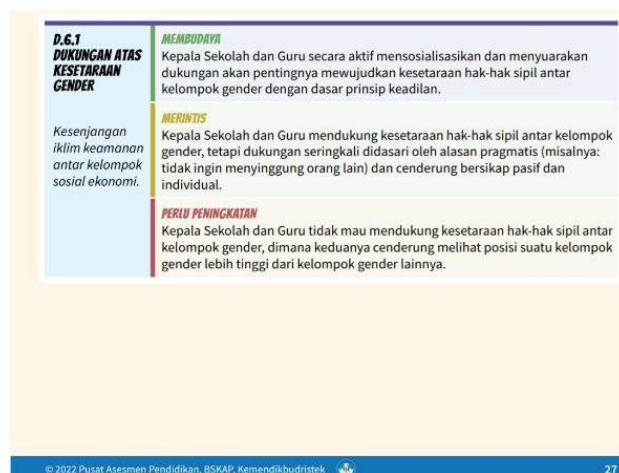
D.6 IKLIM KESETARAAN GENDER		
Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik.		
<p>MEMBUDAYA</p> <p>Satuan Pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan.</p> <p>2,26 s.d. 3,00</p>	<p>MERINTIS</p> <p>Satuan Pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif.</p> <p>1,85 s.d. 2,25</p>	<p>PERLU PENINGKATAN</p> <p>Satuan Pendidikan belum mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender, dimana keduanya cenderung melihat posisi suatu kelompok gender lebih tinggi dari kelompok gender lainnya.</p> <p>1,00 s.d. 1,84</p>

D.6.1 DUKUNGAN ATAS KESETARAAN GENDER

MEMBUDAYA
Kepala Sekolah dan Guru secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan.

MERINTIS
Kepala Sekolah dan Guru mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender, tetapi dukungan seringkali didasari oleh alasan pragmatis (misalnya: tidak ingin menyinggung orang lain) dan cenderung bersikap pasif dan individual.

PERLU PENINGKATAN
Kepala Sekolah dan Guru tidak mau mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender, dimana keduanya cenderung melihat posisi suatu kelompok gender lebih tinggi dari kelompok gender lainnya.



(a)

(b)

Gambar 2. (a) Dalam asesmen nasional sudah tertera secara jelas tentang pembentukan iklim kesetaraan gender dilingkungan sekolah, (b) Dijelaskan secara eksplisit dukungan atas kesetaraan gender.

Dari pemaparan dan gambar dokumen diatas sudah semakin memperjelas bahwasannya kurikulum merdeka sudah sangat mendukung terciptanya iklim kesetaraan gender dilingkungan sekolah, yang mana hal ini perlu dipahami dan dihayati oleh para guru atau pendidik, agar benar-benar bisa mengimplementasikan secara holistik dalam lingkup pendidikan di sekolah.

4. Kurikulum Merdeka Berbasis Gender dan Pandangan Epistemologi

Pengertian Epistemologi secara bahasa yaitu “Episteme”, “Logos”, “Episteme” berasal dari Yunani yang artinya pengetahuan (knowledge), sedangkan “logos” bermakna teori. Sedangkan secara etimologis epistemologi yaitu teori yang menjelaskan pengetahuan. Dalam esensinya epistemologi mengupas apa arti pengetahuan itu, asalnya dari mana, serta proses berlangsungnya bagaimana. Secara sederhana dalam kaitannya pendidikan, epistemologi menurut Brameld dalam Idri mengartikan "epistemologi memberikan keyakinan serta kepastian kepada guru bahwa mereka memberikan kebenaran kepada siswanya".²² Maka epistemologi secara holistik merupakan teori dalam pengetahuan dimana pembahasannya dari berbagai segi pengetahuan, seperti kemungkinan, asal muasal, sifat alamiah,

²² Suaedi, Pengantar Filsafat Ilmu (Bogor: IPB Press, 2016), hal. 91.

batasan-batasan, asumsi, landasan, validitas serta reliabilitas hingga ujungnya soal kebenaran.²³

Dalam kajiannya “epistemologi” ada beberapa macam salah satunya epistemologi objektivisme, hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa realitas dan pengetahuan sudah ada di luar pemikiran manusia dan tugas manusia lah yang kemudian menangkap dan menggenggam pengetahuan ini. Sedangkan asumsi dasar tentang epistemologi konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan tidak ada tanpa adanya pemikiran dari akal, jadi pengetahuan muncul dari pemikiran manusia.²⁴ Epistemologi konstruktivis mengacu pada pandangan filosofis bahwa pengetahuan dikonstruksi melalui interaksi dengan orang lain, komunitas dan lingkungan, serta ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang mutlak.²⁵

Berdasarkan epistemologi konstruktivisme tersebut, menurut Ertmer & Newby tidak berpandangan sama dengan behaviorisme dan kognitivisme dimana pengetahuan bebas dari pemikiran manusia dan dapat dipetakan dalam pemikiran manusia. Konstruktivisme tidak menyangkal bahwa realitas berada di luar pemikiran manusia, namun apa yang manusia ketahui tentang dunia luar diciptakan oleh interpretasi dan pengalamannya. Manusia menciptakan makna dan tidak sekedar memperoleh makna²⁶

Ada empat identifikasi penting dalam konstruktivisme, yaitu: pembelajaran aktif, pembelajaran melalui tindakan, pembelajaran oleh guru yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa, dan pembelajaran kolaboratif. hal tersebut menunjukkan bahwa melalui teori konstruktivis, guru tidak boleh mengajar dengan cara tradisional.²⁷

Berkaitan dengan hal diatas, setiap makhluk di dunia ini diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk

²³ Idri. “Epistemologi Ilmu pengetahuan, ilmu hadis, dan ilmu hukum Islam”. Jakarta :Prenadamedia Group. 2015

²⁴ Charalambos, V.” Constructivism versus Objectivism: Implication for interaction, course design, and evaluation in distance education”. In International Journal of Educational Telecommunications, 6(4), 339-362 @2000.

²⁵ Harasim, Learning Theory and Online Technologies. Routledge. New York. 2017.

²⁶ Ertmer, P.A., Newby, T.J. Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features From an Instructional Design Perspective in Performance Improvement Quarterly. Wiley Online library.2013.

²⁷ Dale H. Schunk. 2012. Motivasi dalam Pendidikan Teori, Penelitian, dan Aplikasi, (Jakarta:PT.Indeks), hlm 56

menjalankan tugas tersebut, karena setiap orang mempunyai hak dan kemampuan.²⁸ Kemampuan ini merupakan cikal bakal dari segala kemampuan manusia yang harus ditingkatkan agar dapat maju dan bertumbuh. Dalam rangka aktualisasi potensi yang dimiliki, maka setiap manusia memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain yaitu dengan proses Pendidikan.²⁹

Maka dari itu asal munculnya kesadaran akan potensi manusia baik laki-laki maupun perempuan bisa diperoleh melalui Pendidikan, karena di dalamnya akan diperoleh pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar salah satunya dengan proses pembuatan kurikulum. Kurikulum Merdeka menjadi sebuah proses mencapai tujuan pendidikan nasional dengan konsep “merdeka belajar” yaitu membangun Indonesia yang memiliki kedaulatan, kemandirian, keadilan, kesetaraan serta berkepribadian melalui program Pelajar Pancasila.

Dalam pandangan epistemologi, kurikulum merdeka perspektif gender ini memiliki semangat yang selaras dengan paradigma pembelajaran konstruktivisme. Kurikulum Merdeka memberi kesempatan bagi siswa untuk mengarungi lautan pengetahuan dengan pengalamannya sendiri dan menghasilkan pemahamannya sendiri yang unik dan berbeda dari pengalaman dan pemahaman orang lain. Dalam implementasi kurikulum merdeka, terdapat keterkaitan yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan yaitu antara idealisme filosofis dan merdeka belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memfokuskan kepada siswa agar memiliki waktu yang lebih dalam eksplorasi pengembangan ketrampilan yang dimilikinya.

Eksplorasi konsep upgrade ketrampilan tersebut terstruktur dalam kurikulum merdeka salah satunya proyek P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, didalamnya sudah terkandung akan nilai-nilai kesetaraan serta keadilan sehingga bisa menjadi sebuah metode membuat kurikulum merdeka yang berperspektif gender. Sebagai contoh hasil penelitian dari perguruan tinggi ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) Cirebon sebuah Lembaga Pendidikan dibawah naungan LSM Fahmina. ISIF Cirebon berusaha melakukan berbagai pendekatan berbasis gender dalam kurikulum yang

²⁸ Hasan Baharun dan Robiatul Awwaliyah.” PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI ISLAM”. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 5(1).2018

²⁹ Ramayulis & Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009) 169-171.2009.

berlaku, seperti Contributions Approach; Transformational Approach; Social dan Action Approach.³⁰ Pendekatan-pendekatan tersebut kemudian bisa di terapkan juga dalam kurikulum merdeka, sehingga akan menjadi sebagai berikut:

1) Contributions Approach

Dalam pendekatan ini, kurikulum merdeka bisa melakukan menerapkan secara jelas isu gender ke dalam mata pelajaran terkait. Dimana tawaran mata pelajaran tersebut diantaranya; 1) Studi Gender dalam pelajaran pendidikan agama bisa menggunakan konsep kajian islam gender menurut Nur Rofiah, 2) Studi Demokrasi dalam projek P5, 3) Pelajaran Sejarah yang juga mengangkat tentang kepemimpinan perempuan, dan 4) Pelajaran Pluralisme atau kebhinekaan dalam mata pelajaran PKN. Dalam kurikulum merdeka sendiri setelah penulis mencoba mencari informasi pada media youtube materi gender sudah ada yaitu di mapel PKN tentang Keragaman Gender dan kebhinekaan Indonesia pada Bab 4 kelas 7 semester 2, kurikulum Merdeka berikut link aksesnya. (https://www.youtube.com/watch?v=RYroiL_UD-s)



Gambar 3. Pembelajaran materi tentang gender di sekolah
Setelah melihat isian materinya, penulis mengkritisi konten dari materi yang ada, dikarena pengetahuan tentang gender tidak dijelaskan

³⁰ Umi Hanik dan Mohammad Fauzi, "Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus Di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)". Dalam PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 1, No. 2, pp. 50~58, ISSN: 2963-4075. 1(2), 50-58, 2023.

berdasarkan teori yang relevan, maka penulis memberikan saran pengajaran konten materi tentang gender dalam kurikulum merdeka bisa menggunakan konsep teori dan materi gender dari Mansur Fakhri yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Gender Indonesia.

2) Transformational Approach

Pendekatan yang dilakukan berkaitan dengan nilai, etika, standar, dan tujuan jangka panjang. Dimana mata pelajaran di sekolah baik keahlian ataupun jurusan serta metodologi, struktur dan perspektifnya harus berperspektif gender. Seperti dalam pembelajaran pendekatan berdiferensiasi dan juga projek P5 didalamnya bisa disisipi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

3) Social dan Action Approach

Implementasi pembelajaran yang berperspektif gender dalam kurikulum merdeka bisa dibuat pembagian 40% untuk teoritis dan 60% praktik. Pada pendekatan ini siswa bisa senantiasa diarahkan untuk pengambilan keputusan serta tindakan sehari-harinya agar bisa lebih adil gender. Sebagai contoh mata pelajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah 1) Projek kearifan lokal mengolah makanan, 2) kewirausahaan 3) Bakti sosial kemasyarakatan, 4) Praktik Kerja Lapangan/PKL bagi satuan pendidikan kejuruan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dunia Pendidikan masih cukup banyak diwarnai berbagai kasus salah satu kasus kekerasan dan juga perundungan, maka dari itu perlu adanya kurikulum yang didalamnya menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan kurikulum merdeka setelah diteliti cukup mendalam ternyata sudah sangat mencakup dalam pengetahuan dan penumbuhan tentang kesetaraan gender, hal tersebut dibuktikan dari kurikulum merdeka pendekatan berdiferensiasi, projek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dan juga pada penilaian nasional rapor Pendidikan pada asesmen Iklim Kesetaraan Gender.
2. Pandangan epistemologi yang mengkaji tentang asal, struktur, metode dan tujuan ilmu dalam hal ini tentang kurikulum merdeka perspektif

gender sudah memenuhi sebagai sebuah pengetahuan. kurikulum merdeka persepektif gender ini memiliki semangat yang selaras dengan paradigma pembelajaran konstruktivisme. Kurikulum Merdeka memberi kesempatan bagi siswa untuk mengarungi lautan pengetahuan dengan pengalamannya sendiri dan menghasilkan pemahamannya sendiri yang unik dan berbeda dari pengalaman dan pemahaman orang lain. Maka untuk penerapan prosesnya bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni : Contributions approach; Transformational approach; Social dan Action Approach.

Saran

1. Bagi sekolah dan para pendidik untuk bisa lebih mendalami dari kurikulum merdeka khususnya tentang nilai-nilai yang didalamnya menyangkut kesetaraan gender, karena berbagai kasus kekerasan dan perundungan yang masih sering muncul, harapannya bisa dihentikan atau menjadi lebih baik dengan penerapan kurikulum merdekan berbasis gender yang dilakukan secara serius dan menyeluruh.
2. Pengalaman penulis selama mengenyam bangku Pendidikan tidak ada sama sekali pembelajaran tentang gender, maka dari itu mata pelajaran khusus pembahasan tentang gender untuk bisa diadakan disekolah, agar tumbuh paradigma tentang kesetaraan yang utuh yang didapat oleh siswa.
3. Perlu adanya Training Of Trainer tentang materi gender kepada guru, karena dari pengamatan materi yang sudah ada tentang keragaman gender bahasannya masih cukup general dan menurut penulis masih ada misspersepsi didalam materi yang ada.

REFERENSI

- ACDP KemendikbudRistek. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Indonesia". Respository, Kemdikbud.go.id, 2022. Retrieved September 28, 2023, from <https://repositori.kemdikbud.go.id/8569/1/Policy-Brief-ACDP-Gender-Equality-Indonesia-FINAL.pdf>
- Ainiyah, Q., Pendahuluan, A., & Faqih, M. M. "Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam". Vol 4-5, 2008.
- Alimuddin, J. "Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Implementation Of Kurikulum Merdeka In Elementary Scholl". *Jurnal*

- Ilmiah KONTEKSTUAL*, Vol. 4(02), 67–75, 2023.
- Andari, E. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning Management System (LMS). *Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 1(2), 65–79, 2022. <https://doi.org/10.30762/allimna.v1i2.694>
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. "Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. Modeling." *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol 5(1), 2018.
- Bastian, A., & Novitasari, Y. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Gender. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4359–4366. 2022. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2639>
- Charalambos, V. "Constructivism versus Objectivism: Implication for interaction, course design, and evaluation in distance education". In *International Journal of Educational Telecommunications*, 6(4), 339–362, 2000.
- Dale H. Schunk. "Motivasi dalam Pendidikan Teori, Penelitian, dan Aplikasi", (Jakarta:PT.Indeks), 2012.
- Dharma, E., Betty Sihombing STIE Sultan Agung, H., & Sultan Agung, S. (t.t.). "MERDEKA BELAJAR: KAJIAN LITERATUR". *Prosiding Konferensi Nasional Pendidikan*. Merdeka Belajar di Era Pendidikan 4.0. Banjarmasin. 21 Juni 2020.
- Ertmer, P.A., Newby, T.J. "Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features From an Instructional Design Perspective in Performance Improvement Quarterly". Wiley Online library. 2013.
- Fakih, Mansour "Ananlisis Gender & Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 6, 2013.
- Febriani, N. A. "Ekosufisme Berwawasan Gender Dalam Al-Qur'an". Dalam *Ekosuf isme Berwawasan Gender dalam Al-Qur'an Musāwa* (Vol. 16, Nomor 1). 2017.
- Ferdaus, Shinta Amalia. " PGSPA Umsida dan Inovasi Gelar Pelatihan Responsif Gender". <https://umsida.ac.id/pgspa-umsidagelar-pelatihan-responsif-gender/> diakses pada 27 September 2023
- Gufron, Anik. "Implementasi Kurikulum Berbasis Kesetaraan Gender". Makalah Seminar Nasional "Gender dalam Pendidikan Formal", Hima Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2009. <https://staffnew.uny.ac.id/upload/131782837/penelitian/IMPLEMENTASI+KURIKULUM+BEBASIS+KESETARAAN+GENDER.pdf>

- Hanik, U., & Fauzi, M. "Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus Di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)". *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 50–58. 2023.
- Harasim, L. "Learning Theory and Online Technologies". Routledge. New York. 2017.
- Idri. "Epistemologi Ilmu pengetahuan, ilmu hadis, dan ilmu hukum Islam". Jakarta :Prenadamedia Group, 2015.
- Kartiningrum, E. D. "Panduan Penyusunan Studi Literatur". Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1–9, 2015.
- Kemendikbud. "Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka" . Jakarta: Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, 2022.
- Kemendikbud. "Buku Panduan Capaian Hasil Asesmen Nasional untuk Satuan Pendidikan". Jakarta: Pusat Asesmen Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek, 2022.
- Maimunah & Mardiah. "Hakikat Pendidikan Islam (Telaah Dasar Evaluasi dalam al- Qur'an, Makna Evaluasi, Bentuk Evaluasi, Prinsip-prinsip, serta Implementasinya)". *Jurnal Al-Afkar*, 7(1), 24–57, 2019.
- Maulida, Riza. "Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka". <https://sdnkembangarum01.dikdas.semarangkota.go.id/read/artikel-populer-pembelajaran-berdiferensiasi-pada-kurikulum-merdeka> 25 September 2023
- Munandar dan Homzah. "Kekerasan Terhadap perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan". PT. Refika Aditama. Bandung, 2010. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Arah-Konsep-Dan-Teoritis-Kajian-Gender.pdf>
- Pendis, Admin. "Kemenag Perkuat Penyelenggara Madrasah Inklusi Bebas Gender". <https://gtkmadrasah.kemenag.go.id/kemenag-perkuat-penyelenggara-madrasah-inklusi-bebasis-gender/> diakses pada 26 September 2023
- Puspa, Atalya. "202 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah, Data Januari-Mei 2023" <https://mediaindonesia.com/humaniora/586443/202-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-data-januari-mei-2023> diakses pada 26 September 2023

- Ramayulis & Samsul Nizar. "Filsafat Pendidikan Islam", Jakarta : Kalam Mulia. 169-171, 2009.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rofiah, Nur Bil.Uzm. "Nalar Kritis Muslimah". Yogyakarta : Afkaruna, 2020.
- Rubingah, N., Yani, J. A., Kartasura, K., Sukoharjo, K., Tengah, J., Saraswati Indriasari, P., & Endang Fauziati., Muhammadiyah Surakarta Jl Yani, U. A. "Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Filsafat Esensialisme", Dalam *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* (Vol. 1, Nomor 1), 2023.
- Suaedi, Pengantar Filsafat Ilmu. Bogor: IPB Press, hal. 91, 2016.
- Sudarman, "Buku Ajar Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik". Samarinda : Mulawarman University Press, 2019. ISBN : 978-623-7480-35-8, hal. 5
- Sugianto. "Pembelajaran Berdiferensiasi Antara Manfaat Dan Tantangannya". Kemdikbud.go.id, 2022. Retrieved September 28, 2023, from <https://bgpsumsel.kemdikbud.go.id/pembelajaran-berdiferensiasi-antara-manfaat-dan-tantangannya/>
- Suhapti, R. Gender Dan Permasalahannya. Buletin Psikologi, Vol. 3(1), ISSN : 0854-7106, 44-50, 1995.